

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta; Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar; Identitas Universitas Hasanuddin
- B. Devi dan Dody Prayogo. 2013. *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory and Policies*. Australia; International Mining Development Centre
- F. A. M. Stroink dan J. G. Steeneek. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang; Bayumedia
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya; Reality Publisher
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia menurut hukum*. Yogyakarta; Pustaka Yudistia
- Paisol Burlian. 2014. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang Undang*, Palembang: Noer Fikri Offset.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- , 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Rajawali Pers
- , 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Rajawali Pers
- Rimbawa Sushanty Vera. 2020. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya; Ubhara Press
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo.

-----, 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers

Sukandarumidi. 1999. *Bahan-bahan Galian Industri*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

2. Skripsi dan Tesis

Aldrianto Munir, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/PN. SGM)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Arthesya Wiliananda Putri, 2022, "*Pembatalan Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Perusahaan CV X Dareh)*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Danang M. Zawahirul Fahmi, "*Akibat Hukum Akuisisi Perusahaan Pemegang IUP yang Belum Mendapatkan Persetujuan Pemerintah Terhadap Pengalihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Ika Astuti, 2017, "*Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Nurfitri, 2021, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid. Sus/2020/PN Kka)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Jurnal

Jailani Syamsudin. (2023). Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi. *Jurnal Tana Mana*, 46-50.

Rifky Maulana & Jamhir. (2019). Konsep Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 90-115.

Maulvi Ratri Adinda Putri, *et.al.* (2023). Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah*, 966-968.

Caren April Ashley Theresa Sangki, *et.al.* (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG. *Jurnal Lex Privatum*.

Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati & Izzah Khalif Raihan Abidin. (2021). PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA PERUSAHAAN PT TAMBANG MAS SANGIHE (TMS) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Jurnal Kamruh Abiyasa*, 95-97.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

5. Sumber Internet

Badan Pusat Statistik (2024, Januari 11). Produksi Barang Tambang Mineral, 2021-2022. Retrieved Juli 29, 2024, Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA4Izl=/produksi-barang-tambang-mineral.html>

- Eka. (2022, Maret 14). *Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya*. Retrieved April 25, 2024, from KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU: <https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/>
- Hukumonline. (2024 Maret 27). Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya. Retrieved Oktober 28, 2024, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>
- Prasetyo, A. (2022, Januari 8). *Langkah Hukum yang Bisa Dilakukan Jika Izin Tambang Dicabut*. Retrieved April 27, 2024, from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-hukum-izin-tambang-dicabut-lt61d9529115164/>
- PUSHEP. (2021, Juli 27). *Berikan Catatan Hukum atas Putusan PTUN Palembang tentang Pencabutan Izin Tambang*. Retrieved April 27, 2024, from PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN: <https://pushep.or.id/pushep-berikan-catatan-hukum-atas-putusan-ptun-palembang-tentang-pencabutan-izin-tambang/>
- Rido Pradana. (2022 Maret 14). *Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya*. Retrieved Oktober 28, 2024, from Kejaksaan Negeri Pulang Pisau <https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/wewenang-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-perizinan-pertambangan-serta-permasalahannya/#:~:text=Pendekatan%20ini%20dilakukan%20karena%20korupsi,maupun%20secara%20perdata%20dan%20pidana.>
- Ridwan Djamaluddin. (2022, Januari 6). *SIARAN PERS NOMOR: 1.PERS/MB.06/DJB/2022*. Retrieved Juni 23, 2024, from Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral : <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20220106-siaran-pers-nomor-1-pers-mb-06-djb-2022>
- Siaran Pers. (2023, Maret 15) *Rakyat Menang, PT Tambang Mas Sangihe Harus Angkat Kaki dari Pulau Kecil Sangihe*. Retrieved Juni 23, 2024, from JATAM : <https://www.jatam.org/rakyat-menang-pt-tambang-mas-sangihe-harus-angkat-kaki-dari-pulau-kecil-sangihe/>

- VII, K. (2022, Maret 31). *Pencabutan IUP harus Transparan dan Sesuai Aturan*. Retrieved April 27, 2024, from DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38363/t/javascript>;
- Wikipedia. (2024, Juni 4). *Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Retrieved Juni 22, 2024, from Wikipedia : [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kepulauan Sangihe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Sangihe)
- Zaenuddin, A., & Gatra, S. (2022, Maret 5). *Izin Usaha Pertambangan Dicabut Pemerintah, Bagaimana Langkah Hukumnya?* Retrieved April 27, 2024, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/03/05/060000380/izin-usaha-pertambangan-dicabut-pemerintah-bagaimana-langkah?page=all>